

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

Tahun 2017-2020

Verawaty¹, Laudya Octha Rini²

^{1,2}Universitas Bina Darma Palembang

Verawaty@binadarma.ac.id, Laudyaoctha78@gmail.com

ABSTRACT

The regional budget is the main policy instrument for local governments, the regional budget is used to determine the amount of income and expenditure. If the management of the regional budget does not reach the revenue target and is not implemented, it will result in excess budget financing (SiLPA). This study aims to analyze local taxes, regional levies, special allocation funds, capital expenditures, and financing receipts that affect SiLPA. This study uses multiple linear analysis with SPSS. The results of the study, namely regional taxes, regional levies and capital expenditures, did not have a significant positive effect on SiLPA, while the results of special allocation funds and financing receipts had a significant positive effect on SiLPA. So that the government needs to pay more attention to regional tax revenues, regional fees and capital expenditures so that they can increase so that the SiLPA rate that occurs does not get higher

Keywords: *SiLPA, regional taxes, regional levies, special allocation funds, capital expenditures, financing receipts*

PENDAHULUAN

Indonesia telah menerapkan sistem desentralisasi untuk menjalankan pemerintahan yang baik dengan otonomi daerah agar terwujudnya Indonesia yang memiliki tingkat efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang baik dalam meningkatkan dan melakukan pelayanan terhadap masyarakat umum Agustina, (2020) yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efektif dan efisien dan dapat menghasilkan otonomi yang baik. salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur secara baik dan hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Seperti yang diketahui bahwa anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam masa satu periode tertentu (satu tahun).

keuangan negara dijelaskan dan diamanatkan bahwa jika terdapat surplus diharuskan dianggarkan pembiayaan, baik sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang akan digunakan menutup defisit dan pengeluaran pembiayaan untuk menyalurkan surplus anggaran. Pada APBD sebagian besar daerah menetapkan anggaran defisit dimana sumber utama penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

PSAP tahun 2021 menyebutkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan atau laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Jika pengelolaan anggaran daerah tidak mencapai target penerimaan dan tidak terlaksananya program akibat perencanaan dan pelaksanaan APBD buruk maka akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

salah satu indikator yang menunjukkan bahwa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik, dengan masih banyak tersisanya SiLPA dalam anggaran pembiayaan APBD maka pendapatan pemerintah akan sulit untuk dicermati dengan baik dan perlu adanya tindakan untuk meningkatkan kinerja SiLPA yang lebih baik dan penggaran yang lebih detail.

Tabel , Fenomena masalah SiLPA dalam anggaran pembiayaan APBD pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan 2020

No	Kabupaten/Kota	SiLPA (%)	Kategori
1	Kab. Ogan Komering Ulu	222.28	Sedang
2	Kab. Oku Timur	7,906.89	Tinggi
3	Kab. Oku Selatan	4.34	Rendah
4	Kab. Ogan Komering Ilir	163.29	Sedang
5	Kab. Muara Enim	1,314.84	Tinggi
6	Kab. Lahat	3,959.64	Tinggi
7	Kab. Musi Rawas	2,568.40	Tinggi
8	Kab. Musi Rawas Utara	141.66	Sedang
9	Kab. Musi Banyuasin	986.31	Sedang
10	Kab. Banyuasin	202.27	Sedang
11	Kab. Empat Lawang	0	Rendah
12	Kab. Pali	1,512.41	Tinggi
13	Kab. Ogan Ilir	1,337.89	Tinggi
14	Kota Palembang	110.41	Rendah
15	Kota Pagar alam	1,682.27	Tinggi
16	Kota Lubuk Linggau	0	Rendah
17	Kota Prabumulih	263.27	Rendah
Sumatera Selatan		116.08	Rendah

Sumber: Djpk.Kemenkeu Provinsi Sumatera Selatan, 2020 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa fenomena yang terjadi pada angka sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dari 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 rata-rata mencapai sebesar 116.08%, dan angka SiLPA tertinggi terdapat pada kabupaten oku timur sebesar 7,906.82% dan di ikuti dengan kabupaten lahat sebesar 3,959.64% sedangkan angka SiLPA terendah terdapat pada kabupaten empat lawang dan kota lubuk linggau yaitu hanya 0% sangat baik. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka SiLPA yang terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi dan tidak optimal sehingga dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam meningkatkan perekonomian daerah dalam memberikan layanan yang baik kepada publik. Dapat diartikan bahwa pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik dalam meningkatkan kinerja SiLPA sehingga menimbulkan permasalahan SiLPA yang tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun 2017-2020”.

STUDI LITERATUR

Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Dalam teori keagenan ini, disebutkan bahwa prinsipal adalah pihak yang memberikan kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah auditor independen pihak yang menerima kewenangan

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun periode anggaran. Selisih lebih antara realisasi pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA, lalu Sisa lebih pembiayaan anggaran pada periode pelaporan tahun lalu dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Namun menurut pendapat lain SiLPA merupakan salah satu sumber penerimaan anggaran dan pembiayaan dalam struktur APBD, SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa pribadi atau badan yang diatur dalam undang-undang, dan tidak akan mendapatkan imbalan langsung melainkan untuk kemakmuran daerah nya sendiri (Dulahi, 2019). Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada konsep nya retribusi sama dengan pajak, dimana pungutannya dilakukan oleh Negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu dana perimbangan yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai dana alokasi khusus diatur dengan Peraturan pemerintah. Dana alokasi khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional, dan mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah (Verawaty, 2020).

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran digunakan pada rangka untuk memperoleh atau menambah aset tetap atau aset lainnya dalam memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi pengeluaran untuk biaya yang melebihi batas waktu

kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dapat dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja. Belanja modal merupakan usaha pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pika, 2018)

Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari pencairan dana cadangan serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah (Nurhalisa, 2018). Pada akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.

METODE

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah sampel jenuh, sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau kurang dari 30. Adapun periode yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebanyak empat tahun, yaitu pada tahun 2017-2020 sehingga jumlah data pengamatan menjadi 68 data.

Jenis Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data tidak langsung yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber dan referensi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), DJPK Kementerian Keuangan (Kemenkeu), buku, jurnal laporan, artikel, beberapa penelitian terdahulu, dan lain-lain. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dana alokasi khusus (DAK), belanja modal, penerimaan pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2017-2020.

Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk mengukur suatu variabel sehingga menjadi sebuah variabel yang dapat diamati dan diukur dengan menentukan hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mengukur faktor yang terkait mengenai pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus (DAK), belanja modal, penerimaan pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan satu variabel terikat (*dependent*) dan lima variabel bebas (*Independent*). Variabel terikat (*dependent*) pada penelitian ini adalah sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sedangkan variabel bebas (*independent*) adalah pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi khusus (DAK), belanja modal dan penerimaan pembiayaan

HASIL

Analisis Data

Setelah dilakukan pemilihan sampel penelitian dengan metode sampling jenuh maka pada penelitian ini semua sampel digunakan dengan 17 kabupaten/kota. Semua variabel penelitian telah lolos uji asumsi klasik. Hasil uji normalitas, yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dengan seluruh variabel di atas $\alpha = 0,05$ yang berarti data yang diuji terdistribusi normal. Pada hasil uji run test penelitian ini, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi. Hasil uji multikolinearitas menyatakan nilai tolerance untuk seluruh variabel lebih besar dari 10% dan VIF lebih kecil dari 10 yang berarti bahwa data penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedastisitas menyatakan nilai signifikansi untuk setiap variabel bebas terhadap nilai absolute residual lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Dengan demikian semua variabel penelitian bisa diuji pada tahapan selanjutnya. Berikut ini hasil analisis regresi

Tabel 1 Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.069	10.138		-.697	.488
	Pajak Daerah	.062	.263	.042	.235	.815
	Retribusi Daerah	-.076	.233	-.052	-.326	.745
	Dana Alokasi Khusus	1.069	.474	.317	2.255	.028
	Belanja Modal	-.409	.320	-.155	-1.276	.207
	Penerimaan Pembiayaan	.607	.106	.618	5.740	.000

a. Dependent Variable: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sumber: Data diolah, 2023

PEMBAHASAN

Variabel Pajak Daerah(X3) terhadap SiLPA

Hasil pengujian hipotesis pertama yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan memperoleh uji t hitung < t tabel pendapatan Pajak Daerah sebesar $0,235 < 1,669$ dan nilai signifikan sebesar $0,815 > 0,05$. Dari hasil yang diperoleh nilai t hitung lebih besar daripada t tabel sehingga hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah pada pemerintahan daerah tidak melampaui target pendapatan dan bahkan mengalami penurunan pada komponen pendapatan pajak daerah sehingga pajak daerah berkontribusi terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan hasil yang hipotesis yang

diperoleh menyatakan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap SiLPA ditolak

Variabel Retribusi Daerah (X2) terhadap SiLPA

Hasil pengujian hipotesis yang kedua menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Dapat dilihat pada hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap SiLPA. Dapat dibuktikan hasil uji t diketahui nilai signifikan Variabel Retribusi Daerah sebesar 0,745 lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai t hitung = $-0,326 < t$ tabel 1,669.

Hal ini dikarenakan hasil pendapatan retribusi daerah memiliki peran yang sangat kecil pada pemerintah daerah dalam menyusun dan mengelola keuangan anggaran belanja daerah. Dikarenakan kontribusi yang sangat kecil maka pendapatan retribusi daerah tidak mampu menopang hampir segala kebutuhan anggaran dalam pembelanjaan setiap daerahnya, apalagi sisa lebih pembiayaan anggaran daerah lebih cenderung mempunyai angka yang lebih besar dari hasil kontribusi pendapatan retribusi daerah yang diterima. Maka oleh karena itu pendapatan retribusi daerah tidak berpengaruh, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap SiLPA ditolak.

Variabel Dana Alokasi Khusus (X3) terhadap SiLPA

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Dapat dilihat pada hasil uji t diketahui nilai signifikan variabel dana alokasi khusus (DAK) sebesar 0,028 dimana nilai signifikannya lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05 ($\alpha=5\%$) dan nilai t hitung = $2,255 > t$ tabel 1,669 maka dapat dinyatakan bahwa variabel DAK berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA.

Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah realisasi dana alokasi khusus (DAK) yang terjadi maka akan meningkatkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Beberapa faktor yang menyebabkan DAK tidak pernah mencapai target yaitu karena pemerintah pusat melakukan dana transfer ke daerah secara berkala dan bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga rendahnya nilai realisasi DAK menyebabkan terbentuknya SiLPA. Dengan demikian hasil hipotesis dapat menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA diterima.

Variabel Belanja Modal (X4) terhadap (SiLPA)

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan memperoleh uji t hitung $< t$ tabel Belanja Modal sebesar $-1,276 < 1,669$ dan nilai signifikan sebesar $0,207 > 0,05$ dari hasil yang diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga memperoleh hasil belanja modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA.

Hal ini karena belanja modal merupakan pengeluaran yang bersifat menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sehingga semakin besar belanja modal yang terealisasi dari yang telah dianggarkan maka akan semakin kecil SiLPA yang terjadi, sebaliknya semakin kecil belanja modal yang terealisasi maka SiLPA yang terjadi akan besar dan meningkat. Dengan demikian hasil hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA ditolak.

Variabel Penerimaan Pembiayaan (X5) terhadap SiLPA

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa hipotesis kelima diterima. Berdasarkan hasil hipotesis yang telah dilakukan memperoleh uji t hitung $>$ t tabel Penerimaan Pembiayaan sebesar $5,740 > 1,669$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,01$ dari hasil yang diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga hasil uji hipotesis dapat dinyatakan variabel penerimaan pembiayaan berpengaruh positif terhadap SiLPA.

Hal ini dikarenakan penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah yang semua penerimaan perlu dibayar kembali pada tahun anggaran. Sehingga penerimaan pembiayaan yang diperoleh pemerintah daerah akan menambah atau mengurangi saldo yang terjadi pada SiLPA tahun sebelumnya dan perubahan pembiayaan yang terjadi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap SiLPA. Dengan demikian hasil hipotesis menyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini mengenai pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal, dan Penerimaan Pembiayaan terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2020 yang telah penulis sajikan, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap SiLPA. Hal ini berarti pendapatan pajak daerah di Sumatera selatan tidak diolah dengan baik sehingga mempengaruhi tingkat SiLPA yang semakin tinggi.
2. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap SiLPA. Hal ini bersangkutan pada Pajak daerah dan retribusi daerah karena pengolahan hasil pendapatan daerah di Sumatera selatan untuk mendanai keuangan pemerintah tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan nilai SiLPA yang semakin meningkat.
3. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA. Hal ini dikarenakan pendapatan anggaran yang diperoleh pemerintah daerah di provinsi Sumatera selatan telah mencapai target dan dana khusus yang dikeluarkan sesuai dengan kegunaan yang semestinya, sehingga angka SiLPA yang terjadi tidak melebihi dan masih diangka wajar.
4. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA. Hal ini dikarenakan anggaran realisasi belanja modal pada pemerintah daerah di Sumatera selatan melebihi batas wajar dan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah pada belanja modal, sehingga angka SiLPA pada belanja modal tidak dapat terealisasi dengan baik.
5. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang menyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan berpengaruh signifikan positif terhadap SiLPA. Hal ini dikarenakan

dana APBD penerimaan pembiayaan dapat menutupi defisit anggaran SiLPA yang menunjang program-program pembangunan pemerintah daerah dengan baik, sehingga angka SiLPA dapat terealisasi dengan baik.

REFERENSI

- adiputra, I. M. P., Dwiyantari, N. K. D., & Darmada, D. K. (2013). *Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali)*.
- Aditya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2013-2015. *Kompartemen*, XV(1), 42–56.
- Agustina, E. (2020). *Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018*. 2(1), 1–8.
- Aljana, T. B., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Struktur Kepemimpinan dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 207–221.
- Bahri, S. (2018). *Metodologi Penelitian bisnis*. CV. Andi Offset Yogyakarta.
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, Wkh, R. Q., ...
- Damayanti, N. P. W. P., & Suartana, I. W. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(3), 575–590.
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 445. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447>
- Dulahi, D. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Kabupaten / Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah)*. 178–189.
- Gumelar, A., & Khairina, N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 342. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13231>
- Guntara, F. C. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten/Kota se-Jawa Tahun 2014-2017*. 1–18.
- Hardiana, A. (2018). *Pengaruh Perubahan Pendapatan, Realisasi Dana Alokasi Khusus dan Perubahan Pembiayaan terhadap SiLPA*. 15(2), 1–23.

- Iswahyudin. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 4(6), 152–168.
- Iswari, N. N., & Bawono, A. D. B. (2018). *Pengaruh Perubahan Belanja Modal, Perubahan Pendapatan Asli Daerah, dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)* [http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/59572%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/59572/2/Naskah Publikasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/59572%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/59572/2/Naskah%20Publikasi.pdf)
- Khoiril, A. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Tahun 2018). *Skripsi*.
- Kirana, M. N., & Wahyudi, S. (2016). Analisis Pengaruh Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Kontrol (Studi Kasus pada Perusahaan Wholesale dan Retail Trade yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2014). *Diponegoro Journal of Management*, 5(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>
- Maharani, T. (2017). The Influence of company size, profitability, solvency and audit firm size toward audit report lag (Empirical Study on Companies Listed in the Indonesia Stock Exchange in 2013-2015). *Skripsi, 2015*.
- Marbun, S., Manalu, E. P., & Malau, Y. N. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019*. 17(1), 19–30.
- Melaty, K. P., & Sari, S. P. (2021). Determinan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa: Studi Kabupaten Sukoharjo. *Maksimum*, 11(2), 123. <https://doi.org/10.26714/mki.11.2.2021.123-130>
- Nurhalisa, S., LS, A. D. A. P., & Hamseng, J. (2018). *Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah (Study Pada BPKD Kabupaten Luwu)*.
- Pika, Saiful, & Aprilia, N. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pinjaman Daerah terhadap Belanja Modal Sumatera Selatan*. 8(22), 125–140.
- Rintonga, H. &. (2016). *Identifikasi Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo)*.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 1.
- Verawaty, V., Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Mbia*, 19(1), 21–37. <https://doi.org/10.33557/mbia.v19i1.560>

